

## **BAB II**

# **KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

### **A. Posisi Konflik Dalam Ilmu Komunikasi**

Sebelumnya diulas kembali pengertian dari komunikasi, berikut menurut Berelson dan Steinter komunikasi adalah proses penyampaian. Penyampaian berupa informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lainnya melalui penggunaan simbol-simbol, seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lain (Suryanto, 2015 : 50).

Posisi konflik dalam ilmu komunikasi Hawes dan Smith, serta Ruben menjelaskan bahwa ilmu komunikasi memandang konflik dengan sudut pandang yang berbeda dengan disiplin ilmu lain. Hawes dan Smith memahami konflik sebagai bagaian penting sebagai satu bentuk hubungan komunikasi interpersonal, berdasarkan tujuan waktu, dan strategi, komunikasi interpersonal sendiri merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan pihak-pihak sebagai satu bentuk individu yang ditandai oleh bentuk-bentuk stereotip serta derajat pertukaran informasi yang tinggi, sehingga secara umum komunikasi menghasilkan beragam kombinasi berbeda pada setiap situasi konflik. (Dewanto, 2016 : 30)

Sedangkan Ruben, komunikasi menjadi sarana yang menghubungkan semua faktor dan kondisi dalam konflik, karena itu bagi Ruben konflik dipahami pada tataran simbolis, atau dalam hal ini penggunaan bahasa dalam hubungan komunikasi, sebagai bagian dari tindakan konflik secara umum. Ilmu komunikasi menjelaskan konflik sebagai bentuk pertentangan serta penggunaan aspek-aspek komunikasi dan pesan untuk mengembangkan konflik atau justru meredam konflik. Konflik dan posisi konflik dalam kajian ilmu komunikasi memberikan pandangan yang baik tentang bagaimana konflik diselesaikan dan dipelajari melalui kajian-kajian ilmu komunikasi.

### **B. Paradigma-Paradigma dalam Kajian Komunikasi Konflik**

Paradigma-paradigma dalam kajian komunikasi paradigma komunikasi dalam konflik dikembangkan oleh digunakan untuk menjelaskan bahwa konflik dari dan komunikasi bergerak berdasarkan pola tertentu sesuai dengan hakikat komunikasi yaitu Proses penyampaian pesan Krauss dan Marsella (2006 : 145) menjelaskan bahwa paradigma komunikasi dalam konflik muncul karena proses komunikasi melibatkan

bentuk pertukaran informasi yang dirumuskan dalam bentuk pesan tertentu kepada pihak yang lain sehingga pesan tersebut merujuk pada proses pemaknaan di dalam mental individu sederhananya pemikiran yang dianjurkan oleh Krauss dan Marcella lebih banyak menunjukkan bahwa peranan kondisi mental individu dalam memberikan makna terhadap suatu pesan menjadi sesuatu yang penting dalam proses komunikasi dengan begitu makna yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki potensi untuk diartikan negatif atau menuntun ke arah munculnya konflik secara garis besar ada empat paradigma komunikasi konflik yang diajukan oleh Krauss dan Morsella tahun 2006 yaitu paradigma encoding decoding, paradigma penentuan perspektif dan paradigma niat, dan paradigma dialogis.

#### 1) Paradigma Encoding Decoding

Paradigma encoding decoding secara detail menurut Krauss dan Morsella encoding decoding dilakukan melalui tiga cara penting. Pertama pengirim pesan merancang pesan terutama proses mengubah kode-kode menjadi bentuk korespondensi satu-satu. Kedua, pesan dikirimkan melalui saluran tertentu dan ketiga, proses penguraian pesan dilakukan oleh penerima agar sesuai dengan pesan yang dikirimkan.

Paradigma encoding decoding sebenarnya memberikan indikasi bahwa komunikasi berjalan menurut serangkaian perintah dan protokol yang sebenarnya tidak disadari oleh kebanyakan orang yang melakukan komunikasi perintah serta aturan mendasar dalam paradigma komunikasi yang dijelaskan Krauss dan Marse 2006 berhubungan dengan aspek perancangan pesan melalui sejumlah kode tertentu.

Sederhananya paradigma encoding-decoding ini menjelaskan bahwa konflik tidak berbeda dengan proses komunikasi secara umum. Penyebab konflik dianggap sebagai kode-kode tertentu yang mendorong munculnya konflik dan eskalasi konflik. Sedangkan penyelesaian atau resolusi konflik bisa dianggap sebagai upaya mencari atau menerjemahkan kode yang digunakan sebagai usaha menentukan jalan keluar yang tepat. (Dewanto, 2016 : 44)

#### 2) Paradigma Niat (Intentionalist Paradigm)

Paradigma kedua yang bisa digunakan untuk melakukan analisis tentang fenomena komunikasi dan konflik dikenal sebagai paradigma niat. Secara umum paradigma ini menjelaskan bahwa proses komunikasi membutuhkan niatan tertentu sebelum proses tersebut dimulai. Dengan demikian semua pesan yang dirancang dalam suatu proses komunikasi digunakan dengan suatu niatan demi tujuan tertentu.

Paradigma Niat menjelaskan bahwa bentuk komunikasi secara khusus yang menitikberatkan pada penggunaan bentuk pesan yang sebenarnya sebenarnya tidak mementingkan penggunaan kata, namun niatan dan tujuan spesifik individu menggunakan pesan-pesan tertentu dalam proses komunikasi dengan kata lain, kepentingan, atau tujuan spesifik dari individu menentukan cara cara yang dilakukan individu untuk melakukan proses komunikasi.

Paradigma niat ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tujuan serta fungsi dari komunikasi yang dilakukan satu pihak terhadap satu pihak lain. Hal itu mengindikasikan bahwa paradigma ini secara kemungkinan besar tidak memperhatikan cara komunikasi tersebut dilakukan dalam hubungan interaksional, niat dan tujuan di belakang komunikasi tersebut, karena itu pada beberapa kasus niat satu pihak dalam proses komunikasi harus dipahami berdasarkan semua aktivitas yang dilakukan oleh individu tersebut, bukan hanya melalui proses komunikasi verbal yang digunakan namun juga melalui bentuk aksi nonverbal. Sederhananya paradigma ini menjadi salah satu alat untuk memahami tujuan, fungsi, dari proses komunikasi, sehingga dapat digunakan juga untuk memahami konflik. (Dewanto, 2016 : 44-47)

### 3) Paradigma Penentuan Perspektif

Paradigma penentuan perspektif menjelaskan bahwa pemahaman individu terhadap suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang tertentu, sehingga perbedaan sudut pandang ikut mengubah penafsiran individu terhadap pesan yang sama, lanjutnya paradigma ini menjelaskan bahwa kesalahan persepsi dalam proses komunikasi dan kesalahan komunikasi bisa terjadi akibat perbedaan sudut pandang individu dengan kata lain konteks komunikasi serta ketidakpahaman individu terhadap konteks yang ada mendukung munculnya kesalahan perspektif. Menariknya paradigma penentuan perspektif juga menjelaskan bahwa pesan yang dirancang dalam proses komunikasi harus dapat dipahami dengan baik oleh pihak

yang lain, demi meminimalisasi kesalahan persepsi yang ada yang bisa memunculkan konflik. (Krauss dan Morsella, 2006 : 150)

Melihat paradigma penentuan perspektif dapat kita pahami bahwa hubungan komunikasi dan konflik berada pada bagaimana pihak yang terlibat dalam proses komunikasi menggunakan sudut pandang yang tepat untuk memahami pesan tertentu sebelum memberikan tanggapan terhadap pesan tersebut kesalahan menempatkan sudut pandang beresiko lebih besar menunjukkan konflik karena tanggapan yang diberikan dalam proses komunikasi kemungkinan besar tidak sesuai dengan pesan yang ada. Karena, perspektif pada dasarnya merupakan jiwa dari aktivitas komunikasi melakukan persepsi terhadap satu pesan serta untuk memberikan tanggapan yang tepat.

Penempatan perspektif, atau cara pandang yang tepat dalam suatu masalah, membantu individu dalam memahami suatu masalah. Dalam kajian komunikasi perspektif sendiri yang tepat membantu komunikasi melakukan persepsi yang tepat terhadap 1 besar karena itu efektivitas pesan dalam proses komunikasi sebenarnya tergantung pada penempatan perspektif kita tebakan komunikasi dalam proses komunikasi tersebut. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa konflik Sebenarnya masih berhubungan dengan bagaimana individu menempatkan perspektifnya dalam menafsirkan pesan. (Dewanto, 2016 : 48)

#### 4) Paradigma Dialogis

Krauss dan Morsella menjelaskan paradigma ini sebagai bentuk paradigma yang menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses yang membutuhkan kesepakatan bersama diantara semua pihak yang melakukan komunikasi tersebut paradigma dialogis merupakan bentuk paling dasar dalam proses komunikasi yang biasa dilakukan sehari-hari termasuk aspek biologis adalah aspek yang dilakukan oleh komunikator dan komunikasi melalui proses pertukaran pesan.

Komunikator menyandikan pesan sementara komunikasi menerjemahkan pesan disebut paradigma dialogis ini memberikan semacam pedoman tentang munculnya aspek resiprokal di antara dua pihak yang saling berseteru hal ini secara umum ditunjukkan hal ini secara umum menunjukkan bahwa proses komunikasi ikut terlibat dalam semua proses konflik sehingga kita bisa memisahkan

komunikasi dan karena itu menjadikan paradigma biologis bisa diterapkan untuk menjelaskan dan memahami konflik.

### **C. Konflik Antarumat Beragama**

Indonesia juga merupakan negara yang multikultural dan sangat pluralistik. Hal ini menjadikan Indonesia negara yang kaya akan budaya tetapi di sisi lain juga memiliki potensi konflik yang sangat besar. Indonesia memiliki potensi konflik yang besar tidak hanya karena memiliki beragam ras dan etnis, tetapi juga karena banyaknya perbedaan lain dalam hal kepercayaan dan budaya. Semua ini tercampur menjadi satu di Indonesia. Sebut saja contoh kasus konflik antaretnis yang terjadi di Ambon, Poso, dan Sampit. Contoh ini menunjukkan bahwa sedikit gesekan dalam perbedaan ini dapat menimbulkan konflik yang luar biasa.

Konflik antar umat beragama secara umum, dapat dimaknai sebagai konflik antar agama atau perselisihan antar pemeluk agama, baik itu antar pemeluk agama itu sendiri ataupun antar pemeluk satu agama dengan pemeluk agama lain. Konflik antarumat beragama bukan hanya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, kekuasaan dan politik saja bentuk tindakan protes atau kekerasan terhadap konflik keagamaan banyak juga bersumber dari kultur dan ideologi dari agama itu sendiri yang bersifat ekspresif atau simbol. Contohnya bentuk suatu tindakan ketaatan terhadap ajaran agama yang di pahami oleh suatu komunitas agama tersebut atau sebagai bentuk kesetiaan pada komunitas itu sendiri. (Al-hikmah, 2018 : 6).

Berikut penulis akan menuliskan beberapa contoh konflik- konflik umat beragama di Indonesia :

#### **1) Konflik Ambon, Maluku Utara**

Konflik kekerasan di Maluku Utara yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon, adalah salah satu konflik terbesar yang terjadi di Indonesia setelah kejatuhan rezim Soeharto. Konflik kekerasan bertargetkan pendatang Muslim dari Bugis, Butond an Makasar. Setelah bermigrasi besar-besaran dari pendatang, konflik menyebar luas kewilayah Maluku. Konflik agama yang kemudian terjadi diperparah dengan desas-desus sekitar simbol keagamaan seperti serangan terhadap mesjid dan gereja.

Konflik di Maluku ini sempat mereda pada Mei 1999 ketika perhatian beralih ke pemilihan umum di Ambon. Kemudian konflik kembali meledak di Ambon pada Juli 1999 ketika kemenangan PDIP diumumkan yang diartikan

jugasebagai kemenangan bagi Kristen. Konflik memuncak kembali pada 26 Desember 1999 sejumlah serangan terhadap Gereja Silo dan pembantaian Tobelo. Gereja Silo terletak ditengah pusat kota Ambon adalah salah satu GerejaProtestan Maluku (GPM) terbesar dan terbakar habis pada hari setelah natal.

Konflik-konflik tersebut merenggut hampir 5.000 nyawa dari tahun 1999 sampai 2002 dan mengungsikan sepertiga penduduk Maluku dan maluku Utara. Upaya penyelesaian pada konflik Ambon tersebut di lakukan pada tahun 1999-2002, akibat banyaknya konflik yang terjadi pemerintah pusat akhirnya memimpin proses perdamaian, yang sangat singkat dalam standar kompratif untuk penandatanganan perjanjian damai Malino II pada tanggal 11 Februari 2002 di pegunungan Malino di Sulawesi Selatan. (Debora ,2017 : 280-286).

## **2) Konflik Sunni dan Syiah Di Jawa Timur**

Gerakan dakwah Syiah mulai muncul pada tahun 1980 an. Jawa timur yang mayoritas muslim yang menganut tradisi Nadlatul Ulama (NU). Konflik kembali meledak adanya kekerasan yang berbalut agama. Dimana kekerasan terjadi dilatarbelakangi adanya antara pengikut ajaran Sunni dan Pengikut ajaran Syiah yang dimana menurut keterangan Said Aqil selaku ketua Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) menyatakan sumber konflik di Sampang adalah perselisihan keluarga yang memperebutkan pengaruhnya sebagai Ulama di Sampang.

Konflik Sunni dan Syiah ini juga sebenarnya tidak bisa lepas dari akar budaya masyarakat yang masih lekat dengan tradisi kekerasan atau Carok. Tradisi lainnya masyarakat Sampang sehari-harinya adalah membawa senjata tajam berupa “clurit” yang disebut “nyikep”.

Konflik yang berujung pada aksi kekerasan massa sudah menyebabkan ratusan warga yang diduga pengikut ajaran Syiah harus diungsikan ke Siduarjo dengan alasan menjaga stabilitas dan kekondusifan masyarakat. Peristiwa Puger ini meledak di saat proses rekonsiliasi konflik Sampang masih dalam tahap pematangan. Walaupun sebenarnya di awal tahun 2012 sudah dilakukan penyelesaian konflik dengan ditandatanganinya perundingan damai antar kedua belah pihak. (Syukron Mahbub, 2018 : 93-95)

## **3) Konflik Pendirian Rumah Ibadah**

Pendirian rumah ibadah banyak terjadi. Pembangunan tempat ibadah, khususnya gereja sering memicu konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi pendirian rumah ibadah tersebut. Konflik ini terjadi umumnya karena gereja didirikan di tengah-tengah pemukiman yang mayoritas penduduknya Muslim. Berikut konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia :

a) **Konflik Bandung**

Aksi unjuk rasa di halaman kantor Biz Park, Jl. Kopo, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul. Direktur Nahdliyyin Centre, Abdul Chalik menuturkan aksi itu dipicu adanya rencana pembangunan rumah ibadah di samping lokasi pondok pesantren. Warga mempertanyakan dan menolak karena Gereja di bangun tepat di dekat pesantren. Penolakan masyarakat ditandai dengan aksi yang dilakukan sekitar 1000 santri, orangtua santri, Nahdliyyin Centre, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (Fosil PP) se-Kota Bandung, dan Muslimat NU Bandung serta pimpinan Pondok Pesantren Sirnamiskin.

Pihaknya kedatangan perwakilan dari Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang memberi tahu akan membangun rumah ibadah di lokasi pembangunan Biz Park yang berdekatan dengan pondok pesantren. Pada 30 Oktober 2017 Gereja Bethel Indonesia sudah disahkan oleh Pemerintah mengenai legalitas IMB rumah ibadah. Pihak panitia membangun Gereja yang lokasinya berbeda pada saat tahun 2012, GBI yang dibangun ini beralamat di Jl. Karasak Barat Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul yang berarti secara administrasi pihak panitia Gereja sudah memenuhi prosedur. Namun warga masih menolak atas pendirian gereja, masyarakat ingin meninjau kembali pada izin pendirian gereja, masyarakat khawatir adanya kristenisasi dan karena sudah ada gereja yang sama yang dibangun didekat wilayah tersebut. Resolusi konflik terus dilakukan oleh pemerintah, sampai dengan mendapat titik terang dengan melakukan kesepakatan jalan damai. Akan tetapi perlu adanya pengawasan agar tidak ada lagi ujaran kebencian apalagi merusak kerukunan umat beragama. (Azzka ,2018 : 8 ).

b) **Konflik Bogor**

Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 dan menuai masalah pada tahun 2008 dimana Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja tersebut. Alasannya ada beberapa

keberatan dari forum ulama dan ormas islam se Kota bogor, sejak izin pendirian tersebut dibekukan pemerintah Bogor menggembok gerbang Gereja.

Sebagai solusi wali kota Bogor pada masa itu menawarkan lokasi baru milik pemerintah untuk ditempati GKI Yasmin. Namun usulan ini ditolak GKI Yasmin dengan landasan putusan MA dan juga alasan historis bahwa kasus serupa pernah menimpa jemaat Hurian Kristen Batak Protestan, imuhnya setelah menerima relokasi tetapi pihak pemerintah tidak pernah menerbitkan izin peribadatan seperti yang dijanjikan .(Firdaus , 2014 : 224).

Pada tahun 2009 terjadi lagi pembangunan gereja kemudia di demo oleh warga muslim Curug Mekar yang berujung pada pemasangan spanduk penolakan warga dan penutupan akses jalan menuju gereja. Maret 2010 adanya dugaan kasus pemalsuan tanda tangan yang digunakan sebagai syarat pembuatan IMB gereja Yasmin. Pada Agustus 2010 berdasarkan keputusan Ombudsman RI pemkot Bogor melepas segel yang hanya berlangsung satu hari, kemudian satuan polisi pamong praja kembali menyegel gereja GKI Taman Yasmin. Setelah 15 tahun konflik GKI Yasmin kini memasuki babak baru setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghibahkan lahan seluas 1.668 m2 untuk bisa dibangun gereja baru tempat ibadah. (Beritasatu.com, 13 Juni 2021)

#### **D. Pentingnya Kerukunan Umat Beragama**

Secara etimologis, kata rukun berasal dari bahasa Arab , yakni “rukun” yang berarti tiang, landasan, atau perintah. Bentuk jamak dari rukun adalah “arkan” dari arkaan dipahami sebagai harmoni secara keseluruhan yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dari setiap unsur yang saling menguatkan. Kesatuan tidak akan tercapai jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sebaliknya yang dimaksud kehidupan beragama adalah terjadinya hubungan yang baik antara pemeluk satu agama dengan pemeluk agama lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, melalui saling menghormati, saling peduli satu sama lain, menjaga kesatuan sama lain dan menghindari kemungkinan bahaya atau menyinggung perasaan (Jirhanuddin, 2010 : 40).

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006, Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesamaan dalam pengalaman ajaran agamanya serta

kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerukunan adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama, dengan cara menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama, dan menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Kerukunan demikian inilah yang diharapkan sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Tugas mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Setiap individu dan kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu terlibat dan berhubungan satu sama yang lain dalam berbagai kepentingan, perlu memahami secara benar dan tepat arti kerukunan hidup umat beragama, bagi kepentingan mereka. Nampaknya, amatlah jelas bagaimana kita mesti bekerja sama dengan penganut agama non-Islam. Dengan semangat kerja sama, tanpa menghilangkan dan mengurangi bobot kualitas iman kita, jalinan antarumat beragama menjadi sangat penting terutama dalam rangka memperkokoh integritas bangsa. Dengan sadar menjalankan tri kerukunan, yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan inter umat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. (Nazmudin, 2017 : 28)

#### **E. Strategi Komunikasi dalam Resolusi Konflik**

Kehidupan manusia selalu tidak bisa dipisahkan dari komunikasi, karena komunikasi merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia dalam bermasyarakat atau berinteraksi satu sama lain. Kegagalan komunikasi juga menyebabkan konflik yang tidak sedikit kita jumpai, penyebab konflik yang berasal dari kegagalan komunikasi diantaranya adalah kesalahan komunikasi, kesalahpahaman arti, perbedaan persepsi, perbedaan kebudayaan, perbedaan keyakinan, dan ketidakpahaman satu sama lain.

Resolusi konflik adalah suatu cara mengelola konflik yang bertujuan membantu orang-orang yang sedang berkonflik untuk mengatasi emosinya, sehingga mereka lebih siap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam konflik dengan cara yang digunakan melalui tindakan yang tenang dan cenderung menggunakan pikiran yang dingin. Pengelolaan konflik juga mentransformasikan konflik menjadi suatu kekuatan yang mempromosikan penghidupan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu orang mengetahui cara-cara mengatur tingkah laku mereka yang membantu mereka untuk dapat menyelesaikan apa yang dianggap sebagai perbedaan-perbedaan.

Dalam konflik antar umat beragama, mengelola konflik berarti memberikan seperangkat prinsip dan alat untuk memberikan ruang terhadap masyarakat agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian. Adapun upaya atau strategi komunikasi dalam resolusi konflik menurut (Sahidin , 2019: 48-49) adalah sebagai berikut :

Pertama, kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Identitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki budaya perdamaian yang berarti menunjukkan komunitas tersebut merupakan komunitas yang beradab. Hal ini dikarenakan konflik merupakan simbolisasi kultur barbarian. Tentunya dengan memiliki kearifan lokal, komunitas tersebut ingin mencitrakan dirinya sebagai komunitas yang cinta damai.

Kedua, kearifan lokal sendiri menyediakan adanya aspek kohesif seperti elemen perekat lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang dan arena dialogis guna melunturkan segala jenis eksklusivitas politik identitas yang melekat di antara berbagai kelompok. Upaya menjembatani berbagai lintas kepentingan adalah upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik yang lebih besar.

Ketiga, berbeda halnya dengan penerapan hukum positif sebagai media resolusi konflik yang selama ini sering dilakukan para penegak hukum dan terkesan “memaksa”. Hal inilah yang menjadikan resolusi konflik dengan hukum positif sendiri justru sifatnya artifisial dan temporer meskipun memiliki kekuatan hukum tetap. Banyak kasus anarkisme agama yang diselesaikan melalui pendekatan hukum positif seperti halnya SKB Tiga Menteri sering jalan di tempat, bahkan lebih banyak dilanggar. Kearifan lokal sebagai bagian dari resolusi konflik alternatif justru lebih ke arah mengajak semua pihak untuk berunding dengan memanfaatkan kedekatan emosi maupun kultural.

Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi.

Kelima, Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas kebudayaan yang dimiliki. Maka bisa dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatkan kembali hubungan antar sesama masyarakat yang tereduksi perebutan kepentingan politik maupun ekonomi.

Untuk mencegah konflik yang terjadi maka perlu diadakannya beberapa mekanisme yang dapat di pilih, misalnya : Membentuk forum yang berasal dari berbagai bagian masyarakat untuk diadakannya musyawarah agar kiranya menemukan titik damai, Mengirim sesepuh dari marga, suku, atau kelompok adat dengan yang dimaksud adalah golongan tua dengan maksud sebagai utusan untuk melakukan dialog perdamaian, sebagai pembuktian agar tidak akan terulang lagi nilai-nilai sentimentil pada diri masyarakat, mengundang tokoh-tokoh agama dari lintas agama untuk melakukan intervensi, dengan tujuan menyediakan ruang untuk mengumpulkan seluruh masyarakat dari lintas agama sebagai wujud persatuan, memanfaatkan ritual yang ada dengan tujuan untuk membawa orang bersama-sama memperhatikan nilai-nilai yang ada.

Pada dasarnya strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana pelaksanaan operasional secara taktis dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan yang dilakukan bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi. Anwar Arifin mengungkapkan bahwa berbicara tentang strategi komunikasi, berarti berbicara tentang bagaimana sebuah perubahan diciptakan pada khalayak dengan mudah dan cepat. Perubahan merupakan hasil proses komunikasi yang tak terelakkan. Semua pihak yang berkomunikasi, mau tidak mau pasti mengalami perubahan baik perubahan kecil maupun perubahan besar .(Arifin,2019:10)

Di dalam perlindungan terhadap kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama bagaimana meningkatkan SDM dan Lembaga Kerukunan sesuai dengan keinginan umat, bangsa

dan negara. Tindakan MUI, pihak Kepala Departemen Agama dan Pemerintah melakukan musyawarah dan mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik keagamaan.